

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN
KINERJA ORGANISASI PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA (PKK) DI DESA PEJALIN KECAMATAN
TANJUNG PALAS KABUPATEN BULUNGAN**



SEMINAR PROPOSAL

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana (S1)
Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Kaltara

Disusun Oleh:

HUSNUL HATIMAH
NPM.202251009

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KALTARA
TANJUNG SELOR
2026**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang.....	Error! Bookmark not defined.
1.2 Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
1.3 Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.4 Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Pembatasan Konsep	9
2.2 Penelitian Terdahulu	9
2.3 Kajian Teori	13
2.3.1 Konsep Peran.....	13
2.3.2 Pengertian Pemerintah Desa	16
2.3.3 Definisi Kinerja Organisasi.....	23
2.3.4 Konsep Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).....	28
2.4 Kerangka Pikir	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
3.2 Jenis Penelitian.....	32
3.3 Data dan Sumber Data.....	33
3.4 Fokus Penelitian	35
3.4 Teknik Pengumpulan Data	36
3.6 Uji Validitas Data	38
3.7 Teknik Analisis Data	39
DAFTAR PUSTAKA.....	41

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
2.1	Penelitian Terdahulu	8
3.1	Waktu Pelaksanaan Penelitian	29
3.3	Sasaran Informan	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Halaman
2.1	Kerangka Berpikir Penelitian	28
3.1	Teknik Analisis Data	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gerakan Kemasyarakatan atau yang dikenal dengan nama lain pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) merupakan salah satu penggerak utama dalam pembangunan masyarakat dari tingkat desa. Di Desa Pejalin, organisasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah desa untuk melaksanakan 10 program pokok PKK yang berkontribusi langsung dalam aspek kehidupan keluarga mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi hingga lingkungan. Keberhasilan program-program ini sangat bergantung pada efektivitas kepengurusan PKK dan dukungan dana lokasi anggaran oleh pemerintah Desa, Kabupaten, dan Provinsi. Selain itu, dukungan lain yang mencakup aspek regulasi seperti pembinaan kapasitas, penyediaan sarana prasarana serta integrasi program PKK kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk mentransformasikan masyarakat agar mampu berkembang menjadi komunitas yang berdaya, memiliki kekuatan nyata dalam melindungi serta memperjuangkan nilai-nilai dan kepentingan mereka di berbagai aspek kehidupan. Pemberdayaan masyarakat memiliki makna sebagai proses peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat. Hal ini tidak hanya mencakup penguatan kemampuan individu, tetapi

juga mencakup penguatan sistem lembaga sosial yang menjadi landasan kehidupan bermasyarakat. Dalam mewujudkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat, diperlukan dukungan melalui pengelolaan pembangunan yang bersifat partisipatif dan penguatan kelembagaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Pada penyelenggaraan pemerintahan yang menjunjung tinggi prinsip kejujuran, keterbukaan, akuntabilitas, dan demokrasi, masyarakat perlu dilibatkan secara aktif. Oleh karena itu, dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, perlu dikembangkan mekanisme yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama.

Secara geografis Desa Pejalín berada di Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Desa Pejalín merupakan desa yang mulai berkembang dan memiliki potensi sumber daya alam seperti hasil pertanian, perkebunan dan sumber daya manusia yang perlu dikembangkan secara optimal melalui pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan untuk mewujudkan pembangunan nasional. Dalam aspek sosial dan ekonomi pentingnya peningkatan kualitas hidup masyarakat yang menjadi dasar utama untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki desa. Desa pejalín memiliki jumlah penduduk sekitar 1088 Jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 541 jiwa dan perempuan 547 jiwa. Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di desa sudah lama dibentuk sejak tahun 2019 yang berjumlah kurang lebih 21 orang

pengurus yang terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, bendahara dan masing-masing anggota kelompok kerja (POKJA).

Namun, dalam pelaksanaannya, sering terjadi kurangnya pemahaman akan kebutuhan antara Pemerintah Desa dan organisasi kemasyarakatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Secara tingkat hirarki PKK dibawah binaan Kepala Desa yang bertugas membantu proses pembangunan di tingkat desa sebagai tim penggerak kesejahteraan keluarga. Oleh karenanya diperlukan langkah yang sifatnya tidak hanya normatif tetapi pelaksanaan nyata dalam kegiatan sehari-hari. Dengan ketersediaan sumber daya manusia baik dari pemerintah desa dan PKK yang memahami manajemen organisasi yang menjadi acuan untuk mencapai kinerja yang efektif dan efisien, akan tetapi kondisi ini masih menjadi tantangan tersendiri di pedesaan.

Perubahan reformasi memberikan kewenangan sepenuhnya kepada daerah melalui prinsip otonomi daerah dalam arti daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang – Undang nomor 23 tahun 2014. Pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan yang lebih baik serta memberdayakan masyarakat, agar masyarakat dapat terlibat dalam pembangunan guna kemajuan wilayahnya dan mencapai kesejahteraan, sebab masyarakatlah yang lebih mengetahui apa yang mereka butuhkan. Berlandaskan dengan prinsip tersebut maka diperlukan pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

Penyelenggaraan pemerintah yang baik atau yang dikenal dengan *good government* menjadi tanggung jawab pemerintah dalam memahami kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Desa merupakan tokoh utama dalam penyelenggaraan pemberdayaan di wilayah pedesaan. Pemerintah Desa berperan sangat vital dalam proses kesejahteraan masyarakat, karena mendapatkan materi pendukung yaitu dana desa yang bersumber dari penyaluran pemerintah pusat untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. Pemanfaatan dana desa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, agar masyarakat dapat mengembangkan potensinya. Pembangunan desa selebihnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui penyediaan sarana dan prasarana, untuk memberdayakan masyarakat sebagai upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Dalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan pengorganisasian yang mampu menggerakkan masyarakat untuk mampu berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan desa serta melaksanakan administrasi pembangunan desa (Wahyudin et al., 2023)

Melalui penguatan kapasitas dan pembinaan kemasyarakatan pada organisasi PKK yang masih aktif sebagai wadah pemberdayaan perempuan maka pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) harus dapat menjalankan perannya dengan baik dalam membina ibu-ibu rumah tangga yang direkrut untuk terlibat dalam kegiatan pemberdayaan baik peran pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) sebagai fasilitator, perencana, pelaksanaan, pengendali, Penggerak (Kaunang & Sumampouw, 2019).

Namun, dari hasil pengamatan awal ketika melakukan observasi di lokasi penelitian bahwa terdapat indikasi permasalahan pada kinerja organisasi PKK seperti; rendahnya sumber daya manusia sehingga menyebabkan program PKK belum optimal, minimnya pelatihan dalam peningkatan kapasitas ekonomi keluarga yang berkelanjutan, tingkat partisipasi perempuan masih rendah dikarenakan kurangnya informasi yang disampaikan pihak terkait kepada masyarakat mengenai kegiatan yang diselenggarakan. Oleh karena itu, implikasi yang terjadi jika kinerja PKK tidak optimal maka akan berpengaruh terhadap pencapaian pembangunan kesejahteraan keluarga khususnya di Desa Pejalin. Dalam hal ini, diperlukan peran pemerintah desa sebagai fasilitator, regulator, dinamisator, dan katalisator dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kualitas Sumber daya manusia perlu dikembangkan sesuai perkembangan kemajuan masyarakat desa agar dapat menjalankan perannya dengan baik dan efisien. Perubahan sosial pada masyarakat desa berawal dari adanya pengembangan kapasitas pemerintah desanya. Sehingga desa dan masyarakat menjadi salah satu penyelenggara atau pelaksana pembangunan, tidak sebatas objek pembangunan.

Melihat adanya permasalahan yang terjadi oleh karenanya penelitian ini penting untuk dilakukan guna melihat secara lebih mendalam efektivitas peran pemerintah desa dalam mendukung dan meningkatkan kinerja organisasi PKK untuk pembangunan yang berkesinambungan serta melibatkan partisipasi aktif perempuan dalam kegiatan yang diselenggarakan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas peneliti tertarik untuk mengangkat judul “PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KINERJA ORGANISASI PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DI DESA PEJALIN KECAMATAN TANJUNG PALAS KABUPATEN BULUNGAN”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka peneliti menetapkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Pejalin Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan?
2. Apa Saja Faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Pejalin Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Pejalin Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan?

2. Untuk Mengetahui Apa Saja Faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Pejalin Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilaksanakan yaitu :

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk menambah pengembangan ilmu pengetahuan bagi peneliti. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan konsep keilmuan khususnya dalam bidang kajian yang berhubungan dengan peran pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas tim penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji tema serupa.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan informasi bagi Pemerintah Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa khususnya PKK di Desa Pejalin untuk turut melaksanakan program pembangunan yang berkelanjutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembatasan Konsep

Pembatasan konsep dalam penelitian ini untuk memudahkan peneliti dalam memahami konsep penelitian yang ingin diteliti agar lebih fokus dan tidak terlalu luas. Berikut beberapa pembatasan konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup pembahasan meliputi peran pemerintah desa dalam meningkatkan kinerja organisasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) di Desa Pejalin Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan.
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) di Desa Pejalin Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang saling berkaitan dan pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian diantaranya adalah :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan/Persamaan Penelitian
1.	Rawati, Siti Nadia Gunawan (2023)	Hasil penelitian menunjukan Peran pemerintah Desa Napa pada TP-PKK belum berjalan	Perbedaan : Lokasi Penelitian serta indikator yang digunakan.

	<p>“Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Napa Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah”</p>	<p>optimal dilihat dari fasilitator dan katalisator pemerintah memberikan fasilitas terhadap TP-PKK terdapat pada program sandang berupa pemberian barang dan jasa seperti pemberian bambu untuk pembuatan pagar di setiap rumah, terdapat pada program pangan berupa barang yaitu pemberian alat mesin menjahit untuk memenuhi kebutuhan keluarga dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga, terdapat pada program pengembangan kehidupan berkoperasi berupa dana dimana pembinaan dan pengembangan upaya peningkatan pendapatan keluarga (UP2K) di semua kelompok PKK, terdapat pada program pendidikan dan keterampilan berupa dana namun karna dana dan alat yang kurang memadai sehingga masyarakat dalam mengembangkan inovasi dan kreativitasnya belum bisa terlaksana sepenuhnya. masih belum maksimal.</p>	<p>Persamaan : Pada fokus Penelitian dan jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif.</p>
2.	<p>Miftahuljannah, Isabella, Amaliatulwalidain (2022)</p> <p>“Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan</p>	<p>Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kepala desa telah melakukan perannya dengan memberdayakan perempuan melalui pemberdayaan perempuan di bidang kesejahteraan keluarga. Program telah terlaksana dengan baik, dan kepala Desa Air Balui</p>	<p>Perbedaan : Lokasi penelitian serta indikator yang digunakan Persamaan : fokus penelitian serta jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif.</p>

	Perempuan dibidang Kesejahteraan Keluarga (PKK)”	<p>mendukung program yang direncanakan. Bagi ketua pemberdayaan perempuan di bidang kesejahteraan keluarga dan kepala desa, mereka dapat menyukseskan program, terutama peningkatan hasil kerajinan tangan. Kepala desa telah melaksanakan perencanaan dan program peningkatan dalam pengembangan ide-ide kreatif melalui pelatihan. Pelatihan yang dilaksanakan ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian warga Desa Air Balui. Penilaian terhadap Kepala Desa dapat dianalisis bahwa Kepala Desa telah baik dalam melaksanakan program pemberdayaan perempuan melalui kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang kesejahteraan keluarga. Program pelatihan ini dilaksanakan sebagai bentuk keseriusan Kepala Desa dalam memberdayakan perempuan sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Air Balui.</p>	
3.	<p>Ajeng Sonia Dharma¹, Nurul Umi Ati, Agus Zainal Abidin (2022)</p> <p>“Peran Pemerintah Desa Oro Oro</p>	<p>Peran Pemerintah Desa Oro Oro memegang peran sangat penting dalam memberdayakan PKK RW 12 melalui program yang telah dijalankan, khususnya produksi eco enzyme yang sudah berjalan dengan baik dapat dilihat melalui indikator-indikator peran</p>	<p>Perbedaan : Lokasi penelitian serta indikator yang digunakan Persamaan : fokus penelitian dan jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif.</p>

	Ombo Kecamatan Batu Kota Batu Dalam Memberdayakan Organisasi Pkk Rw 12 Melalui Usaha Produksi eco Enzym”	pemerintah, tetapi dalam peran pemerintah masih ada kekurangan dalam terlaksananya program eco enzyme dengan hanya mensupport secara tanggapan positif dengan demikian belum sepenuhnya pemerintah desa mendukung program PKK RW 12, yakni upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa terhadap produksi eco enzyme.	
4.	Isra Hayati (2021) “Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus Desa Lamamek, Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh)”	Hasilnya bahwa peran pemerintah desa dalam pemberdayaan Perempuan di Desa Lamamek Kecamatan Simeulue Barat Kabupaten Simeulue sudah optimal jika diukur dari tiga indikator yang meliputi policy (kebijakan), strategy (strategi), dan communication (komunikasi). Faktor yang menghambat pemerintah desa dalam pemberdayaan perempuan desa yaitu sumberdaya manusia yang belum memadai, kemudian kurangnya minat, kurangnya kepedulian, ketertarikan dan rendahnya partisipasi para perempuan yang ada di desa dalam menjalankan usaha kecil menengah yang telah pemerintah berikan.	Perbedaan : lokasi penelitian dan indikator yang digunakan Persamaan : fokus penelitian dan jenis penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif.
5.	Heri Anriana, Aan Anwar Sihabudin, Abdul Mutholib (2023)	1) Kinerja organisasi bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa di Desa Bojonggedang Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis masih tergolong rendah; 2) Hambatan-	Perbedaan : lokasi penelitian dan indikator penelitian. Persamaan : fokus penelitian dan jenis

	<p>“Kinerja Organisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Di Desa Bojonggedang Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis”</p>	<p>hambatan kinerja organisasi bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa di Desa Bojonggedang Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis adalah kurangnya pengetahuan anggota mengenai tugas masing-masing (rendahnya job knowledge), rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia, keterbatasan anggaran, keterbatasan sarana dan prasarana penunjang, serta adanya pandemi covid-19; dan 3) Upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa di Desa Bojonggedang Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan anggota bidang pembinaan kemasyarakatan desa, melakukan pengawasan yang tinggi terhadap kinerja aparat desa, serta pengalokasian dana yang tepat.</p>	<p>penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif.</p>
--	---	---	---

2.3 Kajian Teori

2.3.1 Konsep Peran

Menurut Riyadi (2002:138) dalam (Wahyudin at al., 2023: 63-82) berpendapat bahwa peran dapat didefinisikan sebagai suatu pihak yang mempunyai bagian untuk memainkan arah dan konsep peran dalam oposisi sosial. Sehingga individu atau organisasi yang memainkan peran

tersebut dapat mempunyai karakter yang sesuai dengan harapan lingkungannya. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut.

Menurut Gustian Ainun Majib, (2023:9) peran adalah sesuatu yang muncul secara teratur karena suatu alasan, karena manusia adalah makhluk sosial yang hidup berkelompok, sehingga anggota masyarakat tersebut saling berinteraksi satu sama lain. Sedangkan peran itu sendiri adalah perilaku teratur yang dihasilkan dari posisi kepribadian seseorang yang juga sangat mempengaruhi bagaimana peran itu harus dilakukan (Selni Paru dkk, 2019).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran merupakan penilaian terhadap seberapa besar tugas dan fungsi dari bagian seseorang mendukung upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, peran adalah suatu konsep yang digunakan oleh setiap orang yang saling berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk bertindak sehubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Menurut arif dalam (Muhardi, dkk, 2014:69) Peran Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat yaitu terbagi menjadi 4 peran yaitu:

- 1). Peran pemerintah sebagai regulator

Peran pemerintah sebagai regulator yaitu menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan (menerbitkan peraturan-

peraturan dalam rangka efektifitas dan tertib administrasi pembangunan). Sebagai regulator, pemerintah memberi acuan dasar yang selanjutnya diterjemahkan oleh masyarakat sebagai instrumen untuk mengatur setiap kegiatan pelaksanaan pemberdayaan di masyarakat.

2). Pemerintah sebagai dinamisor

Peran pemerintah melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Bimbingan dan pengarahan sangat diperlukan dalam memelihara dinamika. Pemerintah melalui tim penyuluh maupun badan tertentu memberikan bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat.

3). Pemerintah sebagai fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Sebagai fasilitator pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan seperti pendampingan dan pendanaan atau permodalan.

4). Pemerintah sebagai katalisator,

Peran pemerintah sebagai katalisator yaitu posisi pemerintah sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi.

2.3.2 Pengertian Pemerintah Desa

Dalam PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 (7) Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah desa atau yang disebut juga dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam PP No. 72 tahun 2005 pasal 14 dan 15 disebutkan bahwa kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah pengaturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerja sama antar desa. Urusan pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa, seperti jalan desa, jembatan desa, pasar desa.

a. Tugas dan fungsi pemerintah desa

1). Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pada permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja (SOT) pemerintah desa. dalam pelaksanaan tugasnya kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembina ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan, dan pengelolaan wilayah;
- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan kesehatan;
- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan

Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2). Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang tertuang dalam permendagri ayat 2 Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja (SOT) pemerintah desa yang memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
- d. Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data

dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

3). Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat dan kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
- c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan

belanja desa, menginventarisir data data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

4). Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi:

- a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa;
- b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
- c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

b. Hak atau Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa

1). Desa berhak :

- a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;
- c. Mendapatkan sumber pendapatan.

2). Desa berkewajiban :

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

3). Masyarakat desa berhak :

- a. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah mengawasi desa serta kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
- c. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa,

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;

d. Memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi :

1. Kepala desa; .erangkat desa;

2. Anggota badan permusyawaratan desa dan Anggota lembaga kemasyarakatan desa.

e. Mendapatkan pengayoman perlindungan dari dan gangguan ketenteraman dan ketertiban di desa

4). Masyarakat desa berkewajiban :

a. Membangun diri dan memelihara lingkungan desa;

b. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik;

c. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di desa;

d. Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan di desa;

e. Berpartisipasi kegiatan di desa. dalam Pembinaan dan Pengawasan berbagai kegiatan di Desa;

2.3.3 Definisi Kinerja Organisasi

Kinerja merupakan aspek utama dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan atau organisasi. Dengan kinerja yang baik maka perusahaan atau organisasi dapat mencapai tujuan yang diinginkannya. Dalam setiap organisasi manusia merupakan komponen yang penting dalam menghidupkan organisasi tersebut. Secara konseptual kinerja dapat dilihat dari dua segi yaitu kinerja individu dan kinerja organisasi, kinerja individu adalah hasil yang diperoleh dari perorangan dalam organisasi, sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas yang dicapai oleh suatu organisasi.

Beberapa definisi organisasi menurut para ahli sebagai berikut :

1. Menurut Chester I. Bernard dalam (Hajar Malawat, 2022) Organisasi adalah sebuah sistem kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk melaksanakan suatu aktivitas yang memerlukan komunikasi untuk mencapai tujuan bersama.
2. Menurut Robbins (1994: 4) dalam (Sahadi et al., 2022) menyatakan bahwa organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan

3. Menurut Muchlis Adnan & Hamim, (2013) Organisasi adalah sarana atau alat untuk mencapai tujuan, artinya bahwa adanya organisasi memudahkan kerjasama yang tertata dan terstruktur, sehingga karyawan merasa nyaman melaksanakan tugasnya sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik.

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan sistem yang dibentuk secara terstruktur memiliki tugas dan fungsi masing-masing terdiri dari 2 orang atau lebih untuk saling bekerja sama guna mencapai tujuan organisasi.

Suryani (2018: 4) menyebutkan bahwa kinerja organisasi dapat dipandang sebagai hasil dari proses yang dilakukan oleh individu-individu yang ada didalamnya berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan. Hal ini pun sesuai dengan pendapat Byremo (Suryani, 2018: 2) yang menyatakan: Untuk mencapai hasil kerja organisasi secara maksimal, setiap organisasi harus berusaha memenuhi tujuannya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya menjamin sambil keberlanjutan organisasi Artinya, jangka kerja panjang. organisasi tercapai apabila tugas atau pekerjaan dilakukan secara efektif dan efisien dan tetap relevan dengan keinginan semua pemangku kepentingan (stakeholder).

1). Indikator – Indikator Kinerja

Indikator Kinerja menurut Robert L. Mathis dan John H. Jackson (2006) adalah sebagai berikut :

1. Kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. Kuantitas yang diukur dari pegawai/karyawan adalah terhadap jumlah pekerjaan yang diselesaikan.
2. Kualitas adalah ketaatan dalam prosedur, disiplin, dedikasi. Tingkat dimana hasil pekerjaan memenuhi tujuan-tujuan yang diharapkan dari suatu kegiatan. Kualitas kerja diukur dari pegawai/karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tingkat penyelesaian pekerjaan dengan keterampilan dan kemampuan pegawai/karyawan.
3. Kerjasama merupakan kemampuan bekerja sama adalah kemampuan seorang pegawai/karyawan untuk bekerja bersama dengan pegawai/karyawan lainnya dalam menyelesaikan pekerjaan yang telah ditetapkan sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya (Mathis, 2006:378).

2). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Ada dua Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja yaitu adalah :

a. Faktor Individu

Secara psikologis, individu yang normal adalah individu yang memiliki integritas yang tinggi antara fungsi psikis (rohani) dan fisiknya (jasmaniah). Dengan adanya integritas yang tinggi antara fungsi psikis dan fisik, maka individu tersebut memiliki konsentrasi diri yang baik. Konsentrasi yang baik ini merupakan modal utama manusia untuk mampu mengelola dan mendayagunakan potensi dirinya secara optimal dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas kerja sehari-hari dalam mencapai tujuan organisasi.

b. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan kerja organisasi sangat menunjang bagi individu dalam mencapai prestasi kerja. Faktor lingkungan organisasi yang dimaksud antara lain uraian jabatan yang jelas, otoritas yang memadai, target kerja yang menantang, pola komunikasi kerja efektif, hubungan kerja harmonis, iklim kerja respek dan dinamis, peluang berkarir dan fasilitas kerja yang relatif memadai (Mangkunegara, 2017:16).

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor individu dan faktor lingkungan saling berhubungan dan dapat mempengaruhi kinerja suatu kelompok atau organisasi dalam mencapai tujuannya.

3) Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Individu

Menurut Robert L.Mathis dan Jhon H.Jackson, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja individu, adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan

Kemampuan adalah kapasitas yang dimiliki oleh setiap individu untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dipercayakan kepadanya, dan suatu penilaian atau ukuran dari apa yang diberikan orang tersebut.

2. Lingkungan kerja

Lingkungan kerja yang sehat merupakan kunci dari produktivitas karyawan agar dapat bekerja lebih konsentrasi dan mendapatkan hasil yang maksimal.

3. Motivasi

Motivasi adalah kehendak atau keinginan yang muncul dalam diri seseorang yang menimbulkan semangat dan dorongan untuk bekerja secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi.

4. Hubungan mereka dengan organisasi

Hubungan yang baik memiliki pengaruh yang besar dan menembus kehidupan organisasi, karena merupakan sebuah jembatan antara karyawan dengan sesama karyawan maupun karyawan dengan

pimpinan. Sebuah organisasi perlu mengelola karir karyawannya agar tetap terjaga produktivitas kinerjanya.

2.3.4 Konsep Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Bab I Pasal 1 Ayat 5 berbunyi : “Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, selanjutnya disingkat Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan”. Dalam pasal 54 ayat (1) Permendagri nomor 99 tahun 2017 tentang pembinaan gerakan PKK yang berbunyi “penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, fasilitasi dan koordinasi, pemberian penghargaan dan pelaksanaan strategi pencapaian kinerja”

Pemberdayaan kesejahteraan keluarga merupakan salah satu lembaga desa/kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat RT/RW atau sebutan lain yang mengkoordinasikan dasawisma. Sementara itu, sistem informasi manajemen gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau yang disingkat SIM PKK adalah aplikasi yang mendokumentasikan,

mengadministrasikan, serta mengolah data program dan kelembagaan gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

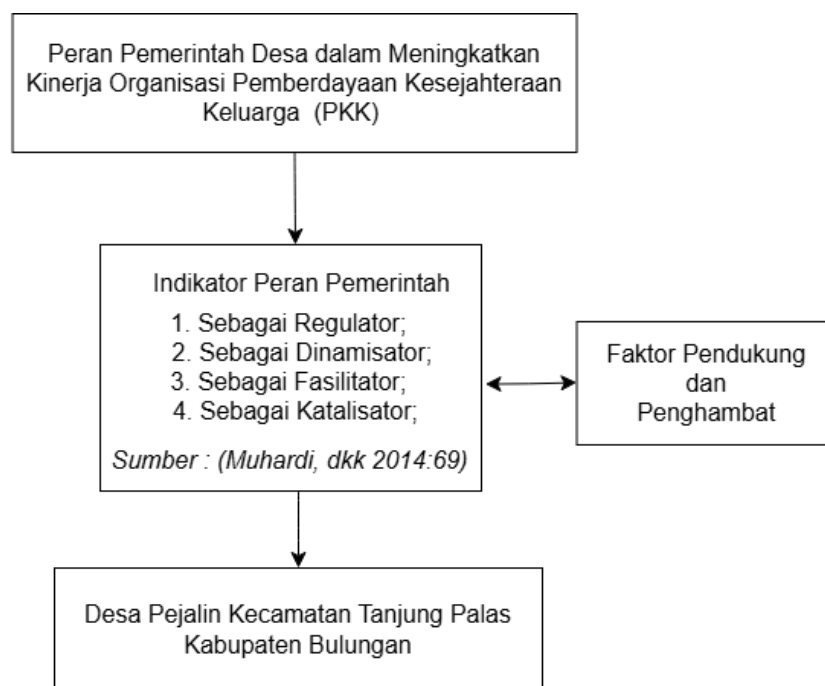
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan segala bentuk tindakan yang dilakukan melalui berbagai macam kegiatan keterampilan yang banyak dilakukan mulai dari hidup sehat, pendidikan keluarga yang dimulai dari lingkungan terbawah Rumah Tangga (RT) hingga Desa dan kelurahan. Keterlibatan PKK secara partisipatif yang berdasarkan pada inisiatif masyarakat bukan hanya sekedar program pemerintah top-down. Dengan tujuan utamanya untuk membentuk keluarga ideal yang mencakup aspek spiritual, moral, kesehatan, ekonomi dan sosial. Dalam mewujudkan tujuan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dapat dilakukan melalui kegiatan keterampilan, pendidikan keluarga, serta pengembangan usaha produktif, yang dimulai dari tingkat terkecil seperti Rukun Tetangga (RT) hingga mencakup desa dan kelurahan.

2.4 Kerangka Pikir

Menurut Syamsul Arifin (2010:37) dalam (simanjuntak dkk, 2017) kerangka berpikir atau pemikiran merupakan suatu model konseptual mengenai teori hubungan sebab akibat terkait faktor yang telah dilakukan penelitiannya sebagai masalah yang penting. Menurut Plano (2010:266) dalam Ira Hayati (2021) kerangka pemikiran merupakan inti dari suatu kegiatan penelitian yang berisikan dasar-dasar teoritis mengenai masalah-masalah yang akan diteliti. Dengan kata lain

kerangka berpikir merupakan alur pikiran yang disusun secara singkat untuk menjelaskan bagaimana sebuah penelitian dilakukan di awal, proses pelaksanaan, hingga akhir. Dalam hal ini peneliti menggunakan konsep kerangka pikir untuk menjawab rumusan masalah penelitian mengenai peran pemerintah desa dalam meningkatkan kinerja organisasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) di Desa Pejalin Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan.

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini antara lain dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini merupakan tempat yang dipilih untuk melakukan penelitian terhadap apa yang hendak diteliti. Penelitian ini berlokasi di Desa Pejalín Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan.

3.1.2 Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu 2 bulan yang meliputi pengumpulan data dan pengolahan dalam penyajian bentuk proposal skripsi.

Tabel 3.1
Waktu Pelaksanaan Penelitian

No	Jadwal Penyusunan Skripsi	Bulan				
1.	Seminar Judul	November 2025				
2.	Seminar Proposal	Januari 2026				
3.	Pelaksanaan Penelitian	Februari	Maret	April	Mei	2026
4.	Seminar Hasil	Juni 2026				

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong (2017:6) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah. Menurut Basri (2014) Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh berhubungan dengan obyek yang diteliti bagi menjawab permasalahan untuk mendapatkan data-data, kemudian dianalisis dan mendapatkan kesimpulan penelitian dalam situasi dan kondisi tertentu.

Menurut Nazir (1998:63) dalam Florenita Tamba (2022:27) metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Metode penelitian dalam hal ini berfungsi untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan menekankan unsur manusia sebagai instrumen penelitian maka akan mempermudah penyesuaian dengan kenyataan yang terjadi dilapangan.

3.3 Data dan Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data dari penelitian ini yaitu berasal dari sumber data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer disebut sebagai data baru atau asli (Siyoto dan Sodik, 2015:67). Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara yang berkaitan dengan topik penelitian. Jenis data yang diperoleh yakni mengenai peran pemerintah desa dalam meningkatkan kinerja organisasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) di Desa Pejalin Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan.

Dalam penelitian ini peneliti menentukan informan dengan teknik “*purposive sampling*”. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu Sugiyono (2016:56). Purposive sampling yang juga disebut sebagai sample penilaian atau pakar adalah jenis sampel nonprobabilitas. Tujuan utama dari purposive sampling untuk menghasilkan sample secara logis dapat dianggap mewakili populasi Sugiyono (2016:85).

Dengan kata lain peneliti memilih informan yang benar-benar mengetahui kondisi internal dan eksternal Desa Pejalin Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan. Sehingga mereka akan dapat memberikan

informasi dan data secara tepat dan akurat tentang peran pemerintah desa dalam meningkatkan kinerja organisasi (PKK) di Desa Pejalin. Informan dalam penelitian ini berasal dari unsur Pemerintah Desa, Pengurus PKK dan Masyarakat. Berikut informan yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.3
Sasaran Informan

No	Sasaran Informan	Jumlah Informan
1.	Kepala desa	1
2.	Aparatur Desa	2
3.	Ketua BPD	1
4.	Wakil PKK	1
5.	Sekretaris PKK	2
6.	Bendahara PKK	1
7.	Anggota PKK	4
8.	Masyarakat (partisipan)	3
Jumlah		15

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Hardani, 2020, hal. 121). Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan-laporan lain yang bersifat informasi tertulis sebagai penunjang hasil penelitian.

3.4 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini harus memiliki batasan yang disebut sebagai fokus penelitian. Sehingga penelitian ini memfokuskan terhadap masalah yang menjadi tujuan penelitian. Konsep atau teori yang digunakan oleh peneliti yaitu teori peran dari (Muhamdi, dkk, 2014:69) mengenai peran pemerintah sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, dan Katalisator. Fokus penelitian dapat bertambah dan berkurang berdasarkan data yang ditemukan di lapangan. Fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peran pemerintah desa dalam meningkatkan kinerja organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Desa Pejalín Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan.
2. Faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja PKK di Desa Pejalín Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2016 : 309) menyebutkan bahwa pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer, dan lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam dan dokumentasi. Jadi pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data digunakan untuk menggali informasi atau data lebih mendalam (Suwartono, 2014: 41). Teknik pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti. Beberapa jenis teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

3.4.1 Observasi

Menurut Sutrisno dalam Sugiyono (2013 : 145) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Pengamatan secara langsung yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sehingga dapat dicocokkan antara hasil wawancara atau informasi dari subjek penelitian secara langsung yang digunakan untuk mendapatkan data tentang peran pemerintah desa dalam meningkatkan kinerja pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) serta faktor pendukung dan penghambat kinerja PKK di desa Pejalin.

3.4.2 Wawancara

Menurut Sugiyono (2016:149) menyatakan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara merupakan satu teknik pengumpulan data melalui metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Teknik wawancara dilakukan karena peneliti memerlukan komunikasi dan hubungan secara langsung dengan objek yang ingin diteliti. Peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan narasumber.

3.4.3 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2019 : 329) menyebutkan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dari penelitian kualitatif. Sehingga dalam penelitian ini. Peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, seperti data kepengurusan organisasi PKK, data kegiatan organisasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), data perangkat desa pejalain, serta foto-foto kegiatan.

3.6 Uji Validitas Data

Menurut Sugiyono (2019 : 365) uji keabsahan data pada penelitian kualitatif merupakan pembuktian keabsahan atau kevalidan data-data yang ditemukan di lapangan. Data hasil penelitian dapat dikatakan “Valid” apabila data-data tersebut mengandung kebenaran sesuai dengan data yang ada di lapangan. Untuk menghindari adanya data yang tidak valid, peneliti menjaga keabsahan data dengan menggunakan teknik Triangulasi. Menurut Sugiyono (2015:83) triangulasi data merupakan teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada. Menurut Wijaya (2018:120-121) triangulasi data merupakan teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

Dalam Penelitian ini teknik triangulasi lebih mengutamakan keefektifan proses dan hasil yang diinginkan. Triangulasi dilakukan dengan menguji apakah proses wawancara dan hasil tes yang digunakan berjalan dengan baik. Tes dan wawancara digabungkan untuk mendapatkan informasi data yang relevan. Apabila informasi yang diperoleh dari hasil tes wawancara tidak dapat memenuhi keakuratan data, maka akan diteliti lebih dalam selama wawancara berlangsung. Sehingga akan tercapai kombinasi antara hasil tes dan wawancara selanjutnya akan digunakan untuk menarik kesimpulan. Dan juga bandingkan hasil antara teks satu dan teks dua dengan pertanyaan yang hampir sama.

3.7 Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dalam Hardani, dkk (2020: 161-162) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga mudah dipahami serta temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis menurut Miles dan Huberman dalam Hardani (2020: 163) dibagi dalam 4 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Keempat alur tersebut adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut meliputi sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data

Pada analisis model pertama dilakukan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

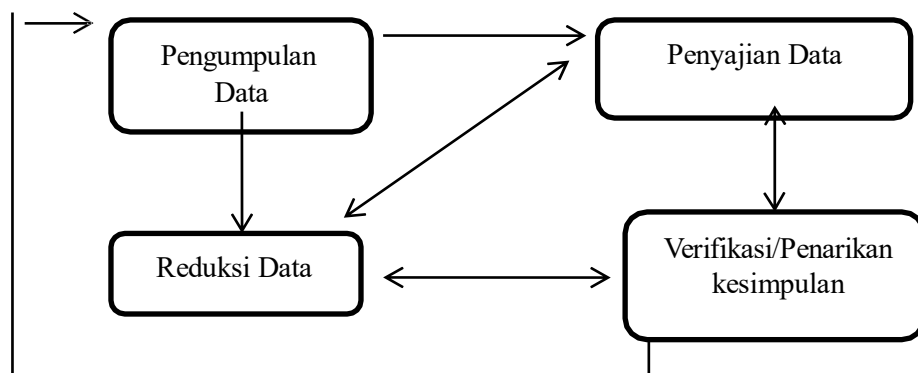
Reduksi data diartikan sebagai proses seleksi, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, mengelompokkan, mengarahkan dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan dan diverifikasi.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan serta pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir berdasarkan pada uraian sebelumnya atau keputusan yang didapatkan berdasarkan metode berpikir induktif dan deduktif. Simpulan yang dibuat harus selaras dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dijelaskan. Simpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.



Sumber :Miles dan Huberman dalam Hardani (2020: 163)

Gambar 3.1 Teknik Analisis Data

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). *Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi*.
- Basri. 2014. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Bandar Lampung: Restu Agung
- Hardani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group.
- Muh, N. (2014). *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar*.
- Mathis, R. L. (1). Dan John H. Jackson. 2006. *Manajemen sumber daya manusia*.
- Malawat, S. H. (2022). *Buku Ajar Pengantar Administrasi Publik. Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin*.
- Mangkunegara A.A. A Prabu. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nazir, M. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Paru, S., Kaunang, M., & Sumampouw, I. (2019). *Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu*. Jurnal Eksekutif,
- Paru, Selni dkk. (2019). *Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Salibabu Kecamatan Salibabu*. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan.
- Riyadi. (2002). *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta : Gramedia.
- Suryani. 2018. *Kinerja Organisasi*. Yogyakarta: Deepublish
- Sahadi, N. S., & Puspitasari, E. (2022). *PENGEMBANGAN ORGANISASI (Tinjauan Umum Pada Semua Organisasi)*. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 8 (2), 399–412.
- Simanjuntak, D. S., Nadapdap, K. M. N., & Winarto, W. (2017). *Pengaruh persepsi penilaian prestasi kerja terhadap kepuasan kerja karyawan*. Jurnal Manajemen, 3(2), 6-13.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta
- Sugiyono 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: PT Alfabeta
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: PT Alfabeta
- Suwartono, M. (2014). *Dasar-dasar metodologi penelitian*. Penerbit Andi.

Wijaya, T. (2018). Manajemen Kualitas Jasa. Edisi Kedua. Jakarta: PT.Indeks.

Wahyudin, W., Kuswana, D., & Herdiana, D. (2024). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat. Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, (1).

Dokumen Perundangan :

Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa.